

BPK Serahkan Temuan

Bansos ke Polda

Tribun Pontianak

KAMIS
17 MEI 2012

■ Laporan Keuangan Pemkot WTP

PONTIANAK, TRIBUN - Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat Adi Sudibyo mengungkapkan telah menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara untuk kasus dugaan penyimpangan bantuan sosial KONI Kalbar ke Polda Kalbar.

"Sekitar satu bulan lalu penyerahannya, untuk perhitungan kerugian negara," kata Adi Sudibyo di Pontianak, Rabu (16/5)

Kasus Bansos ini bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

Adapun temuan BPK terhadap dana Bansos antara lain untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan. Dana tersebut digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp 1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar serta adanya ketekoran kas KONI

” Juga perlu meningkatkan mekanisme pengendalian intern terkait dengan penerimaan pendapatan retribusi persampahan agar tidak terjadi kembali penyimpangan. ”

ADI SUDIBYO

Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat

Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar.

Apresiasi

BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011 dengan paragraf penjelas. Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar Adi Sudibyo mengatakan bahwa penyerahan tersebut merupakan yang pertama dari 15 entitas di Kalbar yang diperiksa. "Pemeriksaan dilakukan selama tiga puluh hari berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara," kata Adi Sudibyo.

Ia melanjutkan, berdasarkan hal itu, mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Hasilnya, kata dia, BPK RI menyatakan opini WTP dengan paragraf penjelas, yakni Pemerintah Kota Pontianak belum mengelola persediaan

barang cetakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara memadai.

Kemudian, belum informatif dalam menyajikan data aset tetap dan menyajikan aset milik pihak lain, serta belum mengelola pendapatan retribusi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara memadai.

"Juga perlu meningkatkan mekanisme pengendalian intern terkait dengan penerimaan pendapatan retribusi persampahan agar tidak terjadi kembali penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah," kata dia.

Adi Sudibyo mengharapkan agar opini yang diperoleh tidak dijadikan sebagai hal

Bansos Kalbar

- Talangan anggota DPRD Kalbar Rp 10,07 miliar.
- Satgas Pra-PON Rp 1,368 miliar
- Pelatda PON XVII Rp 8,59 miliar
- Kas KONI Kalbar tekor Rp 2,114 miliar

DATA: BPK, SUMBER: ANT

yang euforia untuk dirayakan secara besar-besaran, tetapi menjadi pacuan dan dasar untuk mendorong tata kelola keuangan pemerintah kota yang lebih baik.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyatakan akan segera memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan dalam paragraf penjelas.

Ia berharap seluruh jajaran

Pemerintah Kota Pontianak mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan dan memperbaiki opini yang diperoleh tersebut.

"Terima kasih kepada BPK, BPKP, dan semua pihak yang telah memberikan arahan sehingga Pemerintah Kota Pontianak dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Sutarmidji. (ant/ita)

Jangan Menyimpang

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Hartono Azas, memberikan apresiasi penuh pada seluruh jajaran Pemkot Pontianak atas raihan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kami syukuri dengan status WTP, dimana tiga tahun lalu sempat terpuruk dengan status *disclaimer* dan dua tahun berturut-turut dengan status wajar dengan pengecualian (WDP). Artinya hanya ada beberapa catatan kecil yang perlu diperbaiki," ungkapnya pada saat ditemui *Tribun*, Rabu (17/5).

Dia mengatakan raihan opini WTP ini menunjukkan kerja keras DPRD dalam melakukan kontrol pengawasan kepada penyelenggara pemerintahan dan merupakan



TRIBUN/DOK

Hartono

berkat kerjasama yang sungguh-sungguh.

"Saya mewakili DPRD memberikan apresiasi kepada Walikota Pontianak yang telah mencapai status tertinggi, status ini juga berkat kerja keras dari seluruh anggota DPRD dalam rangka memberikan pengawasan dan memberi masukan dalam rangka mendorong unsur penyelenggaraan pemerintah agar tidak menyimpang dari fungsi," tandasnya

Meski demikian ia berharap eksekutif terus berbenah untuk mempertahankan status ini. "Jangan coba-coba menyimpang dan saya minta seluruh anggota dewan yang ada terus meningkatkan kinerja dan kerjasama yang baik, serta membangun komunikasi yang baik," tandasnya. (ita)